

Judul : Tere beda dengan Angie  
Tanggal : Sabtu, 02 Juni 2012  
Surat Kabar : Koran Tempo  
Halaman : A2

## “Tere Beda dengan Angie”

Ia dikenal sebagai seorang idealis.

**JAKARTA** — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ruhut Sitompul berharap koleganya yang kini menjadi tersangka kasus suap Wisma Atlet, Angelina Sondakh, bisa mencontoh sikap Theresia Pardede.

Menurut Ruhut, Tere tidak mau masalah pribadi sampai mengganggu kinerjanya di partai. Karena itulah, ia memilih mundur dari legislatif. “Tere adalah Kartini abad kini, yang *legowo* dan tidak mau mengganggu partai,” kata Ruhut di kompleks parlemen, Senayan, kemarin.

Ruhut mengatakan sikap Tere ini sangat berbeda dengan Angelina. Meski terlibat kasus hukum dan menurunkan citra partai di mata publik, Angelina tidak mau mundur dari DPR. “Saya acungkan jempol buat Tere, dan Angie harus meneladaninya,” ujar dia.

Ruhut berharap keputusan Tere mundur dari DPR dan Demokrat tak dikaitkan dengan kasus Hambalang. Dugaan itu karena Tere satu Komisi bersama Angelina Sondakh di Komisi Olahraga. “Dia anak baik. *Enggak* mungkin lah, itu murni karena masalah pribadi,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan berita pengunduran diri Theresia Pardede atau Tere dari parlemen bukan hal yang mengejutkan. Pemeran Oneng dalam serial *Bajaj Bajuri* ini menuturkan, keputusan mundur itu sudah cukup lama dipertimbangkan Tere.

Padahal, dalam pandangan Rieke selama menjadi anggota Dewan, Tere termasuk yang



Anggota Fraksi Partai Demokrat, Theresia Ebenna Ezeria Pardede (Tere), saat memberikan keterangan kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan kemarin.

berkinerja baik dan “lurus”. Namun, diakuinya, sebagai sesama artis, memang tidak mudah menjadi politikus.

Menurut dia, Tere pernah bercerita mengenai perjuangannya meloloskan Undang-Undang Hak Cipta di Komisi Olahraga dan Kesenian Dewan Perwakilan Rakyat. “Dia berusaha betul untuk itu, dan memang bukan hal yang gampang,” kata Rieke kepada *Tempo* kemarin.

Bekerja di DPR, kata Rieke, membutuhkan perhatian lebih. Proses pembuatan undang-undang juga sangat sulit tanpa dukungan masyarakat. Meski begitu, Rieke yakin Tere mundur dari DPR bukan karena tak mampu menyelesaikan tugas sebagai

wakil rakyat.

Politikus Partai Golkar, Nurul Arifin, mengakui tantangan artis yang menjadi politikus itu lebih berat ketimbang orang biasa. Apalagi, menurut dia, sebagai figur publik, sang artis pasti diharapkan oleh masyarakat memberi performa yang lebih menonjol sebagai anggota Dewan. “Sebagai artis, kami harus keluar dari label keartisan itu dan membuktikan kalau kami layak,” katanya.

Nurul pun mengaku memahami kekecewaan Tere terhadap dunia politik. Ia mengatakan pernah mengalami fase seperti Tere ketika awal-awal terjun ke dunia politik. “Karena dunia politik

itu memang keras, memang abu-abu, jadi memang tidak mudah,” kata dia.

Artis-politikus Dedy Gumilar alias Miing mengaku sempat beberapa kali mendapat “curhat” kecewaan Tere terhadap kondisi politik Indonesia. Tere dikenalnya sebagai seorang idealis. Karena idealismenya itu pula, Tere sering kali merasa kecewa.

Menurut Miing, Tere selalu serius jika berbicara soal budaya, seni, dan pendidikan. “Dia orangnya cerdas dan idealis. Dia memang lebih banyak *ngurusin* soal substansinya ketimbang politiknya,” kata Miing.

● ANGGA SUKMA | MUNAWWAROH | FEBRIYAN |  
ARYANI KRISTANTI | IKA GUSLINA | AGUSSUP

## Bahas RUU Profesi Kurator Komisi XIII Siapkan Studi Komparatif

FOTO: DPR GO ID



Yasonna H Laoly

ANGGOTA Komisi XIII DPR Yasonna H Laoly mendorong agar RUU Profesi Kurator memastikan sistem pendidikan serta pelatihan yang mampu menghasilkan figur berkompetensi multidisiplin. Profesi ini tidak hanya diisi sosok berlatar belakang hukum saja, melainkan terbuka bagi keahlian bidang lain yang relevan.

Dia bilang, selain bidang hukum, keahlian yang dibutuhkan seorang kurator mencakup tata kelola aset, manajemen keuangan, serta pemahaman atas berbagai konsekuensi ekonomi. Seluruh kemampuan itu perlu disiapkan secara matang melalui penguatan jalur pendidikan, pelatihan, hingga program sertifikasi bagi para calon kurator.

Penerapan standar yang jelas, kata Yasonna, dirancang agar tiap orang yang menjalankan profesi kurator memiliki kualifikasi serta kemampuan terukur. Langkah ini ditempuh agar kerja di lapangan tepat sasaran. "Selain itu, setiap praktisi wajib memahami secara menyeluruh seluruh tanggung jawab atas kewenangannya," jelasnya, Kamis (3/9/2026).

Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan yang memadai juga terkait erat dengan kualifikasi standar kompetensi serta integritas tinggi yang wajib dipenuhi seorang kurator. Karena profesi ini memi-

liki kewenangan besar dalam mengurus dan membereskan harta *debitur*. Untuk itu, kurator juga wajib diimbangi standar profesi.

Yasonna bilang, standarisasi berfungsi mencegah perbedaan wadah organisasi yang bisa memicu timbulnya ketimpangan standar pelaksanaan tugas. Dalam pembentukan lembaga profesi, kebebasan berserikat dan berkumpul tetap dihormati. Namun tiap organisasi naungan wajib memenuhi syarat tertentu agar keberadaannya tidak memicu perpecahan yang menyulitkan kesetaraan standar mutu.

Dia mengatakan, dinamika organisasi advokat yang berkembang menjadi banyak kelompok sebagai cermin pembelajaran dalam merumuskan tata kelola organisasi profesi kurator. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang awalnya diharap bersatu kini terpecah jadi beberapa kelompok. "Fenomena perpecahan itu harus dijadikan bahan pelajaran berharga," ingatnya.

Selain itu, dia juga memberikan dukungan terhadap kepastian perlindungan hukum kurator saat bertugas sesuai kewenangan UU maupun keputusan pengadilan. Kendati demikian, payung hukum itu bukan berarti memberi kekebalan penuh tanpa batas dari pertanggungjawaban pidana. Bentuk perlindungan yang diberikan tidak boleh bersifat cek kosong.

Yasonna menyarankan agar Panja melakukan studi komparatif ke berbagai negara yang memiliki sistem profesi kurator. Baik yang terintegrasi hukum kepailitan maupun diatur khusus. "Pengalaman negara lain bisa jadi referensi berharga untuk menemukan model pengaturan yang sesuai kebutuhan nyata di Indonesia," ucapnya. ■ PYB